

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa pertimbangan yang mendorong penulis tertarik untuk memilih judul skripsi “*Upaya Palestina Mendapatkan Kemerdekaan Melalui Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Tahun 2011*” yaitu: *Pertama*, penulis tertarik untuk mengetahui mengapa akhirnya Palestina mengajukan diri menjadi anggota PBB setelah sekian lama mengalami keterpurukan akibat penindasan yang dilakukan oleh Israel dan kecaman Israel yang sampai saat ini masih terus dilakukan. *Kedua*, penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana proses yang dilalui Palestina di dalam forum PBB tersebut untuk menjadi anggota penuh PBB. Dan *ketiga*, penulis ingin mendeskripsikan permasalahan yang sebenarnya terjadi mengapa Palestina belum bisa menjadi sebuah negara yang berdaulat dan apa saja langkah-langkah serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Palestina dalam mendapatkan kemerdekaan.

B. Latar Belakang Masalah

Palestina فلسطين (bahasa Arab), Palestina (bahasa Suryani) adalah sebuah daerah di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan dimana saat ini status politiknya masih dalam perdebatan. Tetapi hingga saat ini, sebagian besar negara di dunia termasuk negara anggota OKI, ASEAN, dan Gerakan Non-Blok mengakui keberadaan Palestina sebagai suatu negara.

Palestina terletak di bagian barat benua Asia dan membentuk bagian tenggara dari kesatuan geografis yang besar di belahan timur dunia Arab yang disebut dengan negeri Syam. Perbatasan dengan Mesir dapat digambarkan dengan garis yang hampir membentuk garis lurus yang membelah antara daerah semi-pulau Seena dan padang pasir Al Naqab. Perbatasan ini dimulai di Rafah di Laut Tengah hingga sampai ke daerah Taba di Teluk Aqaba. Di bagian Barat, Palestina terletak di sebelah perairan lepas internasional dari Laut Tengah dengan jarak sekitar 250 km dari Ras El-Nakoura di belah selatan hingga Rafah di bagian selatan.¹

Lokasi strategis yang dinikmati Palestina memungkinkannya untuk menjadi faktor penghubung antara berbagai benua bagi dunia kuno Asia, Afrika dan Eropa. Palestina juga menjadi tempat yang dijadikan pintu masuk bagi perjalanan ke negara-negara tetangga. Ia menjadi jembatan penghubung bagi manusia sejak dahulu kala, sebagaimana ia juga menikmati lokasi sentral (Pusat) yang memikat sebagian orang yang mau bermukim dan hidup dalam kemakmuran.

Tapi apa yang dimiliki oleh Palestina tidak selamanya bisa dinikmati oleh Negara itu sendiri, karena sejak perang tahun pada tahun 1920, setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia I, Palestina jatuh ke kekuasaan barat, batas-batas politik yang dipaksakan pada wilayah tersebut untuk pertama kalinya dalam hampir 2.000 tahun di bawah pendudukan Inggris, nyaman bernama "Mandat" Hari ini geografis. daerah dibagi menjadi Israel (yang didirikan Mei

¹ <http://www.wikipedia.com/read/news/2011/09/24/65835/Palestina-wilayah-Palesina/>. Diunduh pada 15 Oktober 2011

1948 atas tanah diukir dari sejarah Palestina oleh kekuatan Barat menggunakan semua PBB tanpa berkonsultasi dengan penduduk Palestina lokal), Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan Jalur Gaza (di barat selatan sudut negara berbatasan Mesir) yang keduanya Israel menduduki pada tahun 1967. Konflik antara Israel dan Palestina adalah salah satu yang terpanjang dan paling abadi dan eksplosif dari semua konflik di dunia. Untuk Palestina dalam 100 tahun terakhir telah membawa pendudukan penjajahan, pengusiran dan militer, diikuti dengan pencarian yang panjang dan sulit untuk menentukan nasib sendiri.

Untuk Israel Yahudi, mereka yakini sebagai tanah nenek moyang mereka, setelah berabad-abad penganiayaan di seluruh dunia, kembalinya ini "tanah rumah" memproklamirkan diri tidak membawa perdamaian atau keamanan. Setelah puluhan tahun hidup di bawah pendudukan, pemberontakan Palestina populer (Intifadah 1987-1992) terhadap kekuasaan Israel, membawa berbagai perundingan perdamaian yang pertama adalah Oslo (Madrid) proses perdamaian . Kota-kota Palestina, desa, dan sebagian besar dari 19 kamp pengungsi resmi dialihkan kepada Otoritas pemerintahan sendiri Palestina di bawah Oslo proses perdamaian. " Daerah ini, bagaimanapun, tetap berada di bawah pendudukan Israel dengan kontrol penuh militer Israel.

Konflik Israel Palestina adalah masalah tunggal yang telah menghasilkan jumlah terbesar resolusi PBB, masalah Palestina telah menjulang besar di kancah internasional, meskipun Palestina dapat digambarkan sebagai sebuah wilayah kecil, dengan orang-orang Arab asli Palestina yang populasinya relatif kecil. Pada tahun 1967, negara-negara bekas blok Soviet memutuskan hubungan diplomatik

dengan Israel sebagai akibat dari Perang bulan Juni tahun itu. Memang, banyak pemerintah Dunia Ketiga mengusir misi diplomatik Israel dari ibukota mereka dan menawarkan tempat mereka dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) , yang diakui secara internasional pada tahun 1974 sebagai wakil sah rakyat Palestina. Sejak akhir perang dingin, sebagian besar negara telah memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel. Negara-negara baru lahir dari runtuhnya Uni Soviet memupuk hubungan dengan Israel dan PLO sama.

Hanya Israel, Amerika Serikat, dan beberapa sekutu AS, klien, dan dependensi yang terus menyangkal pengakuan Palestina sebagai orang dengan PLO sebagai wakil sah mereka. Sebelum runtuhnya Uni Soviet, posisi lama dipegang Amerika Serikat dan Israel, dikombinasikan dengan meningkatnya pengaruh internasional dari Palestina sejak 1967, sering ditempatkan pemerintah AS dalam posisi tidak bisa dipertahankan. Menggabungkan dengan Intifadah Palestina terhadap pendudukan Israel yang meledak pada bulan Desember 1987, dan Perang Teluk 1991, dan pada saat itu Amerika Serikat menemukan dirinya dalam posisi di mana ia harus melakukan beberapa pekerjaan yang serius menuju perdamaian antara Israel dan Palestina.²

Konflik yang sebenarnya bermula Pada tahun 1947/11/29 saat Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah rencana untuk membagi tanah Arab ke Israel, Palestina, dan zona internasional diberikan meliputi Yerusalem. Setelah negara Israel dideklarasikan pada tahun 1948/05/14, negara-negara Arab menyerang Israel, marah karena kehilangan tanah mereka. Selama perang berikutnya, Israel

² <http://www.allaboutpalestine.com/>. Diakses pada 17 April 2012

mencaplok lebih wilayah Arab daripada yang telah diberikan kepada mereka oleh PBB, dan banyak orang Arab mengungsi dan diberikan kewarganegaraan. Meskipun perang resmi berakhir tahun 1949, permusuhan terus berlanjut. Setelah ancaman invasi, Israel menyerang Mesir pada tahun 1956/10/29 dan menduduki Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai. Karena protes internasional, Israel menarik diri dari daerah-daerah. Setelah blokade oleh Mesir pelabuhan Israel di Teluk Aqaba, dan pemboman Israel dari Dataran Tinggi Golan Suriah, Israel menyerang Mesir, Yordania, dan Suriah pada 1967/06/05. Israel menduduki Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat, dan sektor Arab Yerusalem (Wilayah Pendudukan).

Pada tanggal 22 November 1967, Dewan Keamanan PBB mengadopsi sebuah resolusi, menyerukan Israel untuk menarik diri dari Daerah Pendudukan. Israel menolak, namun Dewan Keamanan PBB tidak melakukan intervensi. Sebaliknya, negara-negara Arab menolak untuk mengakui Israel sebagai sebuah negara, dan organisasi teroris Arab yang dibentuk untuk melawan pendudukan. Israel telah menjadi fokus dari perang gerilya sejak itu, yang mengakibatkan cedera dan kematian dari tentara Israel, gerilyawan Palestina, dan warga sipil Israel dan Palestina.

Proses Perdamaian telah berlangsung sejak tahun 1993. Deklarasi Prinsip ditandatangani oleh Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada tanggal 13 september 1993. Perjanjian Gaza-Jericho ditandatangani pada bulan 5mei tahun 1994, dan Perjanjian Sementara di Tepi Barat dan Jalur Gaza ditandatangani pada 28 september 1995. Otoritas Palestina didirikan sebagai

langkah sementara, dan Israel menarik diri dari pendudukannya atas wilayah di bawah yurisdiksi Pemerintah Palestina, namun tidak dari semua Wilayah Pendudukan. Israel menyerahkan wewenang paling sipil untuk Otoritas Palestina untuk wilayah di bawah yurisdiksinya. Namun, ketika Negara Palestina tidak didirikan seperti yang diharapkan, sebuah Intifada dimulai pada 13 september 2000.

Organisasi teroris seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina terus merusak proses perdamaian dan Otoritas Palestina dengan melakukan tindakan teroris terhadap warga sipil Israel. Otoritas Palestina telah gagal untuk secara efektif menangkap, mengadili dan menghukum mereka yang telah melakukan tindakan teroris. Dan Israel telah menanggapi serangan teroris Palestina dengan hukuman kolektif semua orang Palestina. Israel telah menggunakan kekuatan militer yang tidak proporsional terhadap demonstran Palestina dan warga sipil noncombatant dan memiliki tertindas semua orang Arab di Daerah Pendudukan. Israel telah menghancurkan rumah-rumah Arab, Arab membantah izin bangunan, dan permukiman Yahudi didirikan di Daerah Pendudukan, dengan tanah Arab tanpa kompensasi.

Pada tanggal 12 Maret 2002, Dewan Keamanan PBB lagi didukung pengakuan penuh negara Palestina berdampingan dengan Israel dan menuntut diakhirinya kekerasan. Pada 28 Maret 2002, 21 negara-negara Arab dan Otoritas Palestina menunjukkan bahwa mereka akan memberikan pengakuan Israel penuh jika menarik diri ke perbatasan pra-1967. Beberapa warga Israel mendukung seperti penarikan, tetapi yang lain ingin Israel untuk menggabungkan dalam

dirinya sendiri segala negeri mereka percaya diberikan kepada orang Yahudi oleh Tuhan.

Setelah serangan teroris Palestina yang mengakibatkan kematian warga sipil Israel, pada 29 Maret 2002, Israel memulai serangan dan pendudukan kembali wilayah di bawah yurisdiksi Otoritas Palestina. Banyak warga Palestina sipil tewas dan kehilangan rumah mereka sebagai hasilnya. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mendesak Israel untuk mengakhiri pendudukan kembali ini, tetapi Dewan Keamanan PBB telah gagal untuk campur tangan. Presiden Palestina Yasser Arafat terbatas pada markasnya di Ramallah oleh pasukan Israel sejak saat itu sampai kematiannya pada 04 November 2004.

Pada tanggal 18 juni 2002, Otorita Palestina disajikan garis besar proposal perdamaian, yang membuat konsesi pada status Yerusalem dan pengungsi, tapi bersikeras bahwa mundur Israel ke perbatasan pra-1967 untuk memungkinkan pembentukan negara Palestina. Namun, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon menunjukkan bahwa waktu tidak "matang" untuk negara Palestina, dan mulai membangun "penghalang keamanan" antara Tepi Barat dan Israel, termasuk bagian dari Wilayah Pendudukan dalam Israel.

Pada 24 juni 2002, Presiden Bush mengatakan bahwa dia memimpikan keberadaan Palestina berdampingan dengan Israel dalam waktu 3 tahun, tetapi hanya akan mendukung pembentukan negara Palestina setelah para pemimpin demokratis, tidak terganggu oleh teror, terpilih pada Otoritas Palestina, dan setelah reformasi yang dilembagakan, menciptakan demokrasi konstitusional dengan parlemen yang independen dan efektif dan pengadilan. Pada 2003/4/30,

yang "Road Map" rencana perdamaian diluncurkan, dan pada 2003/11/19, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk mendukung rencana tersebut. Selain itu, pada 2003/11/24, Ariel Sharon mengumumkan Rencana Pelepasan - penarikan sepihak pasukan Israel - jika "Road Map" tidak berhasil.

Pada 09 juli 2004, Pengadilan Keadilan Internasional memutuskan bahwa "keamanan penghalang" melanggar hukum internasional dan harus dibongkar. Meskipun Israel menyatakan akan mengabaikan putusan itu, hal itu memodifikasi, agak, lokasi penghalang. Pada 26 Oktober 2004, Knesset menyetujui Rencana Pelepasan, meskipun perlawanan sengit.

Setelah kematian Yasser Arafat pada 04 november 2004, Mahmoud Abbas terpilih sebagai Presiden Otoritas Palestina pada 09 januari 2005. Pada 08 februari 2005, Mahmoud Abbas bertemu dengan Ariel Sharon dan sepakat untuk mengakhiri Intifadah dalam pertukaran untuk penarikan mundur Israel dari kota-kota Palestina dan pelepasan 900 tahanan. Pada 20 februari 2005, kabinet Israel menyetujui Rencana Pelepasan, dan pelepasan ini dilakukan pada tahun 2005 bulan September tanggal 22, termasuk evakuasi pasukan dan penggusuran pemukim Israel dari 25 permukiman di Jalur Gaza dan Tepi Barat utara.

Pada 26 januari 2006, Hamas memenangkan mayoritas di Dewan Legislatif Palestina. Karena Hamas dianggap sebagai organisasi teroris dan menentang perdamaian dengan Israel, banyak negara menghentikan bantuan kepada Otoritas Palestina. Meskipun koalisi Fatah-Hamas telah diusahakan pada 2006/06/26, gagal, dan konflik bersenjata pun terjadi. Fatah menciptakan koalisi

ekstralegal untuk memerintah Tepi Barat yang dikeluarkan Hamas, dan Hamas mengambil kontrol eksklusif di Jalur Gaza pada 14 Juni 2007

Sementara bantuan internasional dikembalikan ke Tepi Barat setelah 14 juni 2007, Israel memberlakukan blokade di Jalur Gaza. Meskipun seharusnya diangkat dengan gencatan senjata pada 19 Juni 2008, hal itu berlangsung. Blokade ini telah menciptakan krisis kemanusiaan bagi warga sipil Tepi Barat, karena mencegah impor makanan, obat, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya.

Dalam 14 mei 2008, Tony Blair, Utusan Khusus Kuartet (AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB), mengumumkan rencana perdamaian baru berdasarkan Rencana Lembah Damai. Namun, sedikit yang belum dicapai dengan inisiatif ini. Menanggapi roket Hamas terus dan serangan mortir di kota-kota Israel, menewaskan warga sipil Israel, pada 27 desember 2008, Israel memulai serangan udara yang menargetkan infrastruktur Hamas di Jalur Gaza. Sebuah serangan darat dimulai 03 januari 2009. Israel mengakhiri serangannya pada 13 januari 2009, dan menarik diri dari Gaza pada 21 januari 2009. Karena dekat dengan institusi sipil dan tempat tinggal, 926 warga sipil Palestina tewas, termasuk 410 anak-anak. (Israel membantah angka-angka ini.) warga sipil Israel tewas. Sebuah penyelidikan PBB telah menyimpulkan bahwa baik Israel dan Hamas melakukan kejahatan perang dan mungkin kejahatan terhadap kemanusiaan. Blokade Israel berlanjut, seperti halnya serangan Hamas terhadap Israel.

Kedamaian sejati masih dapat direalisasikan: ketika Israel menarik diri ke perbatasan pra-1967, ketika sebuah negara Palestina yang layak diakui bersama dengan Israel, ketika semua pemukiman Yahudi di Palestina menarik atau

membayar kompensasi yang adil atas tanah dan mengakui kedaulatan Palestina, ketika kedaulatan atas Yerusalem bersama oleh Israel dan Palestina, ketika Israel dan Palestina memungkinkan semua orang Arab berkewarganegaraan pengungsi untuk kembali ke rumah mereka atau memberikan penyelesaian hanya alternatif bagi mereka, ketika sumber daya air dibagi secara adil antara Israel dan Palestina, ketika Israel dan Palestina mengakui manusia hak-hak semua warga mereka dan mengenali mereka sebagai warga negara, tanpa memandang etnis atau agama, dan ketika Israel dan Palestina berkomitmen untuk keamanan bersama dan penegakan hukum. Pasukan perdamaian pembukuan internasional mungkin diperlukan untuk menghentikan siklus kekerasan dalam sementara.

Sejak dimulainya konflik bersenjata antara Israel dan Palestina dari tahun 1947 hingga saat ini, banyak sekali pelanggaran Hukum Humaniter yang dilakukan oleh Israel. Sebenarnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Israel tidak saja bertentangan dengan Hukum Humaniter, akan tetapi sekaligus juga bertentangan dengan Hukum Internasional pada umumnya dan bertentangan pula dengan Hukum Hak asasi Manusia Internasional. Konflik Israel-Palestina, bagian dari konflik Arab-Israel yang lebih luas, dapat diartikan sebagai suatu konflik yang berlanjut antara bangsa Israel dan bangsa Palestina. Dan dari semua konflik yang terjadi di Palestina, terdapat faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya pendudukan Israel di Palestina yaitu:

pertama, Klaim teologis dan historis Israel terhadap Palestina.

kedua, Deklarasi Balfour tahun 1917.

Ketiga, adalah pemisahan wilayah Palestina oleh Perserikatan Bangsa-bangsa.

keempat, penyerahan persoalan Palestina dari bangsa Arab kepada Organisasi Pembebasan Palestina (Palestinian Liberation Organization).

kelima, Perjanjian-perjanjian lain yang menguatkan eksistensi pendudukan Israel di Palestina pasca berdirinya negara Israel (Perjanjian Camp David 1, Kesepakatan Oslo, Kesepakatan Wye River, Perjanjian Camp David II).

Konflik Israel-Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel (atau bahkan seluruh orang Yahudi yang berkebangsaan Israel) memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya, sebagian menganjurkan solusi dua negara, dan sebagian lagi menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekular yang mencakup wilayah Israel masa kini, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Sebenarnya, masalah hakiki dari Palestina adalah perampasan tanah Palestina yang didalangi oleh Barat utamanya Inggris, dimana kala itu tujuannya adalah untuk membentuk Negara yakni Israel yang memusuhi kaum Muslim di jantung wilayah kaum Muslim sendiri. Semua itu untuk menghalangi kaum Muslim yang dulunya merupakan bangsa yang satu; dengan bahasa yang satu, agama yang satu, dan harapan yang satu untuk bangkit kembali.

Sejak hubungannya dengan Israel terus memburuk, Palestina yang terus mendapat dukungan dari negara-negara Arab berupaya keras untuk lepas dari penindasan yang dilakukan oleh Israel dengan berbagai macam cara perdamaian.

Proses perdamaian dimulai dengan inisiatif Amerika melalui mantan Presiden Amerika Serikat George Bush pidato untuk Kongres pada tanggal 6 Maret 1991. Proses perdamaian menjadi layak pada saat itu karena perkembangan internasional dan regional yang membuka jalan untuk itu, seperti Intifada Palestina tahun 1987, yang mencerminkan aspirasi dan desakan rakyat Palestina untuk mengakhiri pendudukan militer Israel dan mencapai kemerdekaan untuk Palestina . Hal ini selain untuk runtuhnya Uni Soviet, yang meninggalkan Palestina dan beberapa negara Arab tanpa sekutu internasional yang kuat. Selain itu, dunia Arab menuduh Amerika Serikat memiliki standar ganda dalam kebijakan luar negerinya setelah Perang Teluk melawan pendudukan Irak atas Kuwait, sehingga upaya AS untuk bekerja pada masalah Palestina.

Setelah 18 kunjungan saat itu Menteri Luar Negeri AS James Baker ke wilayah tersebut, di mana ia bertemu dengan Israel dan Palestina serta kepala negara Arab lainnya, sebuah surat undangan dikirim untuk mengadakan Konferensi Madrid untuk Perdamaian Timur Tengah pada tanggal 19 Oktober 1991 dengan bersama Amerika-Soviet sponsor. Isi Surat Undangan Bersama dianggap referensi dasar untuk proses perdamaian. Selanjutnya, Amerika Serikat mengirimkan Surat Jaminan kepada negara diundang berpartisipasi dalam proses perdamaian yang menjadi acuan bagi hubungan AS dengan negara-negara dimana AS memainkan peran sponsor proses perdamaian.

Konferensi Pembukaan Madrid pada 30 Oktober 1991 termasuk pidato penting oleh Presiden Amerika Serikat George Bush, Presiden Uni Soviet Michael Gorbachev, dan Kepala Delegasi Palestina Haider Abdul Shafi, serta pidato oleh kepala delegasi termasuk Israel, Suriah dan Libanon.

Menurut Surat Undangan, negosiasi bilateral adalah untuk mengikuti Konferensi Madrid antara Israel dan Palestina masing-masing, Suriah, Lebanon dan Yordania. Selain itu, negosiasi multilateral mulai di Moskow pada 28 Januari 1992. Ini termasuk komite regional seperti ekonomi regional, lingkungan air pengembangan, dan pengungsi. Palestina-Israel negosiasi bilateral diadakan di 10 putaran dalam waktu dua tahun berakhir tanpa clinching kesepakatan atau pemahaman. Posisi masing-masing pihak yang dirangkum dalam sebuah dokumen Palestina dan dokumen Israel.

Selama 10 putaran dari pembicaraan Palestina-Israel, tidak ada indikasi untuk terobosan, dan isu permukiman Yahudi-Israel ilegal di wilayah Palestina menjadi masalah paling sulit dari sengketa. Tiba-tiba, itu dinyatakan bahwa rahasia back-saluran negosiasi sedang berlangsung antara kedua belah pihak di Oslo, Norwegia. Melalui pembicaraan, Palestina dan Israel mencapai kesepakatan yang disebut Deklarasi Prinsip-Prinsip tentang Interim Self-Pemerintah Arrangement (DOP) , yang ditandatangani oleh PLO Yasser Arafat dan Ketua Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin di Gedung Putih pada 13 September 1993.

Para DOP menetapkan bahwa harus ada periode lima tahun sementara di mana otoritas Palestina akan dibentuk di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Selama lima tahun, kedua belah pihak akan melakukan akhir-status negosiasi pada isu-isu

termasuk Yerusalem, pengungsi, perbatasan dan Yahudi-Israel permukiman. Hasil akhir dari status akhir harus didasarkan pada Keamanan PBB Resolusi Dewan 242 dan 338.

Negosiasi berlanjut selama periode itu sampai Perjanjian Palestina-Israel Interim di Tepi Barat dan Gaza Jalur dicapai pada tanggal 28 September 1995 untuk mengatur hubungan antara Palestina dan Israel selama periode lima tahun sementara. Meskipun demikian, pelaksanaan perjanjian sementara tersebut tidak mulus. Ada banyak kesulitan dalam mendefinisikan dan menerjemahkan perjanjian di samping banyak kendala yang dihasilkan dari oposisi perjanjian ini dari kedua sisi.

Di Israel, dan setelah penandatanganan perjanjian DOP, seorang teroris Israel menewaskan lebih dari 29 warga Palestina ketika berdoa di Masjid Ibrahim di Hebron. Lain teroris Israel dibunuh kemudian Perdana Menteri Israel Rabin atas dasar menentang penawaran perdamaian Rabin telah ditandatangani. Ada juga sejumlah operasi balas dendam Palestina yang terwujud melalui operasi bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam politik Palestina atas dasar dendam dan bertentangan dengan kesepakatan damai.

Setelah perubahan pemerintah Israel, Pemerintah baru Israel Likud yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu dipaksa kembali negosiasi mengenai cara untuk menerapkan aspek-aspek yang tersisa dalam perjanjian sementara. Periode ini memuncak dalam Protokol Mengenai Penggunaan kembali di Hebron pada Januari 1997 dan Nota Sungai Wye ditandatangani oleh Netanyahu dan Arafat pada Oktober 1998.

Masa tenang dan keamanan berlaku setelah Otoritas Palestina berhasil menghentikan kelompok oposisi Palestina dan kegiatan selama empat tahun yang berakhir dengan kembalinya konflik antara kedua belah pihak setelah kegagalan perundingan Camp David untuk solusi final di bawah naungan langsung dan pengawasan maka Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, yang juga disajikan proposal bridging, yang dikenal sebagai Ide Clinton , dan khususnya setelah kunjungan provokatif pada saat itu pemimpin Israel oposisi sayap kanan Ariel Sharon, menteri sekarang perdana, ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada tanggal 29 September 2000. Kunjungan tersebut mengakibatkan protes besar Palestina damai dan demonstrasi, yang Israel menolak dengan kekuatan yang fatal yang menyebabkan pembunuhan harian rata-rata 10 warga Palestina. Ini adalah awal dari kembalinya keadaan konflik kekerasan antara kedua belah pihak bukan perundingan damai, yang berlangsung hampir satu dekade terakhir.

Clinton ikut campur untuk mengakhiri kekerasan itu dengan memegang Sharm el-Sheikh Summit pada tanggal 17 Oktober 2000, yang menghasilkan deklarasi Clinton untuk membentuk komite pencari fakta yang dipimpin oleh mantan Senator AS George Mitchell. Komite ini mengeluarkan Laporan dari El-Sheikh Fakta Komite Sharm , yang kemudian dikenal sebagai Laporan Mitchell, pada tanggal 30 April 2001.

Berbagai macam cara atau upaya perdamaian telah dilakukan antara Palestina dan Israel, namun tetap saja tidak menghasilkan suatu keputusan yang baik dan menguntungkan antara kedua belah pihak, karena setelah gencarnya putaran konflik dan dialog-dialog perundingan yang diawali pada tahun 1948 dari

negara Israel, kesabaran bangsa Palestina hampir habis, dan karena terlalu lama konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, maka Palestina berinisiatif untuk meningkatkan upaya mereka melalui proses diplomasi. Mereka tampaknya telah meningkatkan harapan mereka untuk menciptakan sebuah Palestina merdeka melalui keanggotaan di PBB. Sementara itu tampak bahwa apa yang Israel janjikan dengan proses perdamaian tidak berkelanjutan terhadap negara Palestina yang akan membawa kedamaian kepada rakyat Palestina.

Proses perdamaian, yang dimulai pada tahun 1993 antara Israel dan Palestina untuk mengidentifikasi status akhir Palestina, tidak memberikan hasil yang bermanfaat bagi rakyat Palestina yang selama 18 tahun terakhir di mana Israel terus mengandalkan teror negara, sebuah etnis strategi pembersihan terhadap rakyat Palestina, dan penghancuran infrastruktur administratif dan ekonomi Palestina. Selain itu, selama periode ini Israel juga telah membangun permukiman baru di tanah yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur dan Tepi Barat, dan lebih dari 500.000 penduduk Israel berada pemukiman ini. Bisa dikatakan bahwa karena pelanggaran sepihak Deklarasi Prinsip-Prinsip tentang Persetujuan Oslo yang ditandatangani pada tahun 1993, yang isinya PLO diberi wilayah otonomi, yaitu 60% dari Jalur Gaza dan kota Ariha di Tepi Barat. Imbalannya, PLO mengakui eksistensi Israel. Israel telah menggunakan proses perdamaian Oslo untuk membuat bola yang lebih luas dari tindakan didalam kebijakan luar negeri dan memperoleh legitimasi yang lebih besar di arena internasional. Jika keadaan ini terus berlanjut, akan ada yang tersisa dari Palestina dalam perolehan yang sangat kecil, yaitu daerah terputus seperti Gaza.

Tidak banyak hal berarti yang dicapai dengan ratusan resolusi dengan perdebatan terpanjang dalam puluhan mata acara yang tersebar di berbagai komite PBB untuk perbaikan signifikan terhadap perjuangan Palestina. Melihat hal tersebut, Strategi pemerintahan yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pemimpin dan kepala negara, dari sekarang akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hukum internasional. Selain itu, otoritas ini telah membuat kompromi besar untuk menyelesaikan proses perdamaian dengan cara negosiasi yang dimaksudkan untuk membuat proses perdamaian yang lebih berkelanjutan, dan memutuskan untuk mengejar strategi baru. Yang mana hal inilah yang merupakan salah satu yang tidak diterima oleh Hamas, yang mempertahankan kontrol penuh dan efektif di Gaza berusaha untuk menciptakan sebuah negara melalui keanggotaan di PBB.

Cara diplomasi dan negosiasi pada saat ini merupakan cara yang dipilih dari Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Abbas, karena cara diplomasi diyakini akan mampu memberikan implikasi yang lebih baik terhadap Palestina yang saat ini sedang mencari jati diri melalui pengakuan kedaulatan. Upaya diplomasi ini dilakukan dengan dua cara, yang pertama Otoritas Palestina mengajukan diri menjadi negara anggota bebas merdeka ke PBB, dengan tujuan untuk menjadi anggota tetap PBB yang ke 194. Langkah awal kedua yang dilakukan Otoritas Palestina yaitu dengan melakukan negosiasi langsung dan meminta kepada Negara-negara di dunia untuk mengakui kemerdekaan Palestina berdasarkan perbatasan 1967. Sehingga pada 20 September 2011, Otoritas Palestina (OP) membuat dan mengajukan proposal agar diakui sebagai negara yang merdeka dan

menjadi anggota penuh PBB melalui Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat.

OP meminta pengakuan sebagai anggota penuh di PBB di mana saat ini posisinya hanya sebagai peninjau. Ini akan memberikan implikasi politik dan memberikan akses yang besar bagi Palestina untuk masuk dalam pengadilan internasional di mana mereka bisa mengajukan gugatan resmi terhadap penjajahan yang selama ini dilakukan oleh Israel.

Permohonan sebagai anggota penuh PBB itu didasarkan pada perbatasan tahun 1967 dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibu kota. Langkah itu bukan untuk menggantikan negosiasi langsung dengan Israel, seperti yang selama ini dituduhkan Israel dan AS, melainkan untuk mendapatkan kemerdekaan yang berdaulat.

Bagi Palestina, upaya menjadi anggota penuh PBB bukan sekadar perlambang untuk menegaskan keberadaan mereka sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat. Sebab, misi asli dari otoritas ini adalah untuk menegosiasikan perjanjian damai dengan Israel. Keanggotaan penuh PBB tentu dapat memperkuat posisi mereka dalam perundingan damai dengan Israel. Pemerintah Palestina akan mengupayakan dengan sungguh-sungguh keanggotaannya dalam PBB untuk mengakhiri ketidakadilan sejarah yang selama ini terjadi di negaranya dengan tujuan mencapai kebebasan dan kemerdekaan seperti negara-negara lain di dunia. Palestina tidak akan berdiam diri lagi. Bila permohonan keanggotaan penuh di PBB ditolak DK, mereka akan memohon kepada Majelis Umum PBB

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menetapkan suatu permasalahan sebagai berikut: ***“Bagaimana upaya Palestina untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan melalui forum PBB pada tahun 2011?”***

D. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, pada pembahasan ini penulis menggunakan konsep diplomasi dan konsep negara maerdeka sebagai kerangka pemikiran utamanya.

1. Konsep diplomasi

Dalam hubungan internasional terdapat banyak definisi berbeda mengenai diplomasi yang disampaikan oleh beberapa pakar. Namun disini penulis hanya menulis beberapa definisi yang dirasa sesuai dalam pembahasan permasalahan yang diulas.

Pertama, menurut the Oxford Dictionary diplomasi adalah *“the management of international relations by negotiations”*, dimana kata kunci dari definisi ini adalah manajemen. Yang dimaksud manajemen adalah dilaksanakannya proses *planning, organizing, directing, implementing*, dan *evaluation*. Pada pemahaman ini diplomasi dianggap merupakan suatu upaya

pengelolaan hubungan internasional melalui negosiasi (perundingan) dan dilakukan secara birokratik sebagai penghubung antar-negara.³

Kedua adalah definisi yang diutarakan oleh KM Panikar, dimana dia memberikan pengertian bahwa diplomasi adalah “*the art of forwarding one’s interest in relations to other states*”.⁴ Pemahaman ini lebih menekankan kepada pelaksanaan diplomasi sebagai seni dalam mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Hal tersebut dipertegas pula oleh S.L Roy yang menyebutkan bahwa diplomasi merupakan salah satu usaha negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam pergaulan internasional.⁵

Dari definisi-definisi di atas, maka dapat dilihat bahwa diplomasi merupakan bagian dari politik luar negeri. Diplomasi adalah persoalan “bagaimana” atau mengenai teknis menjalankan politik luar negeri (*foreign policy is what you do, diplomacy is how you do it*). Bila politik luar negeri didefinisikan sebagai “*a strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis-à-vis other state or international entities to achieve a specific goal defined in terms of national interest*”,⁶ maka diplomasi merupakan teknis bagaimana kepentingan nasional sebuah negara itu akan dicapai.

³ S.L Roy, *Diplomasi*, Jakarta: Rajawali Press, 1991, hal 2.

⁴ *Ibid*

⁵ K.J. Holsti, *International Politics: A Frame Work for Analysis, third edition*, New Delhi: Practice Hall of India, 1978, hal 83.

⁶ Jack C Plano, Roy Olton, *The International Dictionary, the Third Edition*, England: Clio press Ltd, 1982, hal 5.

Di dalam dunia global terdapat dua macam diplomasi, yaitu *diplomasi bilateral* dan *diplomasi multilateral*.⁷ Dan di dalam permasalahan Palestina yang menginginkan pengakuan kedaulatan, Palestina menggunakan kedua diplomasi tersebut yaitu diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral, sekalipun pada saat ini, yang lebih nampak adalah jalur diplomasi bilateral yaitu antara Palestina dengan PBB.

Diplomasi Multilateral merupakan diplomasi yang dilakukan lebih dari dua pihak, dan dalam permasalahan ini diaplikasikan pada diplomasi yang dilakukan oleh Palestina terhadap PBB. Sedangkan *Diplomasi Bilateral* merupakan diplomasi yang dilakukan antara dua pihak saja, dan dalam permasalahan ini diaplikasikan pada diplomasi yang dilakukan oleh Palestina terhadap negara-negara di dunia.

Di dalam diplomasi Multilateral, Palestina melakukan negosiasi melalui PBB. Palestina percaya pengakuan simbolis yang besar sebagai anggota penuh PBB akan membantu Palestina untuk mempertahankan kedaulatan maupun integritas negaranya, tentunya dengan bantuan pihak internasional. Perjuangan diplomatis ini dimulai sejak Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengajukan keanggotaan negaranya ke badan dunia itu, pada 23 September. Upaya Palestina itu lahir dari putus asa yang membuncah atas kebuntuan usaha perdamaian. Baik Israel maupun Palestina tidak mengadakan pembicaraan langsung untuk memecahkan kemelut puluhan tahun itu dalam lebih dari setahun.

⁷ pengantardiplomasi.com/2010/06/diplomasi-bilateral-dan-multilateral.html. Diunduh pada 17 Oktober 2011

Sedangkan dalam diplomasi Bilateral, Mahmoud Abbas dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina telah melakukan diplomasi ke berbagai negara sehingga secara tidak langsung telah menumbuhsadarkan pemahaman dunia bahwa Palestina adalah bangsa yang teraniaya dan terjajah oleh Israel sehingga perlu didukung kemerdekaannya.⁸

Selama ini, dalam bangsa Palestina memperjuangkan kemerdekaannya di tempuh dengan dua cara, Hamas yang dikomandoi oleh Perdana Menteri Palestina Ismail Haniya yang cenderung menggunakan cara-cara kekerasan, sedang Fatah yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas lebih suka menggunakan cara-cara diplomasi.⁹

2. Konsep Negara Merdeka

Dalam hubungan internasional, banyak pengertian negara menurut beberapa pakar, diantaranya ;

- Pengertian Negara menurut Prof. Farid S.

Negara adalah Suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan.

- Pengertian Negara menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal

- Pengertian Negara Roelof Krannenburg

⁸ www.detiknews.com/read/2011/11/07/173428/1762222/103/kemajuan-diplomasi-mahmoud-abbas-dan-fatah/. Diunduh pada 17 Oktober 2011

⁹ *Ibid*

Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.¹⁰

Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian negara pada umumnya adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Sedangkan pengertian *Merdeka* menurut kamus Besar Bahasa Indonesia diantaranya adalah ;

Pertama, bebas dari penindasan penjajahan dan sebagainya. *Kedua*, tidak mendapat paksaan atau lepas dari tututan. Dan yang *ketiga*, tidak terkait, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.¹¹

Dari definisi diatas yaitu definisi negara dan merdeka, maka dapat dilihat bahwa *Negara merdeka* adalah Negara yang telah mencapai syarat-syarat utama berdirinya suatu Negara merdeka, yaitu harus ada wilayah tertentu, ada rakyat yang tetap dan ada pemerintahan yang berdaulat, serta bebas dari penjajahan dan lepas dari tuntutan pihak-pihak tertentu. Ketiga syarat ini merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Tidak mungkin suatu Negara berdiri tanpa wilayah dan rakyat yang tetap, namun bila Negara itu tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat secara nasional, maka Negara itu belum dapat disebut sebagai Negara merdeka.¹²

¹⁰ <http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik-kreatif.definisi/pengertian-negara.html>.
diunduh pada 17 Oktober 2011

¹¹ <http://kamusbahasaIndonesia.org/merdeka>. Diunduh pada 17 Oktober 2011

¹² <http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2116880-pengertian-negara-merdeka/>.
Diunduh pada 17 Oktober 2011

Bisa ditarik kesimpulan bahwa kemerdekaan tersebut bisa tercipta manakala suatu negara bisa terbebas dari penindasan, ancaman, intimidasi dari pihak-pihak lain. Dan untuk Palestina bisa dikatakan merdeka, jika tidak ada paksaan dan penindasan dari pihak manapun, tidak ada yang mengancam dan tidak ada yang mengintimidasi. Jika masih ada ancaman, intimidasi penekanan pihak satu dengan pihak lain itu artinya belum merdeka. Itulah makna Negara Merdeka secara umum dalam konsep Negara Merdeka.

Secara historis, sebenarnya Palestina sudah bisa menjadi negara merdeka dan berdaulat dengan wilayah Tepi Barat yang mencakup Jerusalem Timur dan Jalur Gaza, yang diduduki Israel sejak perang Enam Hari pada tahun 1967. Karena menurut sejarah, bangsa Yahudi bukanlah penduduk pertama Palestina, merekapun tidak memerintah di sana selama masa pemerintahan bangsa-bangsa lain. Para ahli arkeologi modern kini secara umum sepakat bahwa bangsa Mesir dan bangsa Kanaan telah mendiami Palestina sejak masa-masa paling kuno yang dapat dicatat, sekitar 3000 SM hingga sekitar 1700 SM.

Karena berdasarkan ketentuan Konvensi Montevideo 1933, kita bisa mengambil sedikitnya beberapa kesimpulan hasil analisa sederhana. Pertama, Palestina jelas memiliki populasi penduduk, memiliki luas wilayah dan pemerintahan yang sedang berjalan menggerakkan roda pemerintahannya. Kedua, Palestina juga sudah mampu melakukan hubungan diplomatik dengan beberapa negara dan organisasi internasional di dunia. Ketiga, Palestina jelas sudah memiliki pemerintahan dengan mekanisme yang sebenarnya yaitu melalui

mekanisme Pemilihan Umum dimana Partai Hamas yang menjadi pemenangnya.¹³

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran diatas, maka penulis membuat hipotesa atas pokok permasalahan di atas sebagai berikut: "Bagaimana upaya Palestina untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan melalui forum PBB pada tahun 2011, yaitu Mahmud Abbas sebagai presiden Palestina mengajukan kemerdekaan Palestina ke PBB dan melakukan diplomasi ke berbagai negara anggota dengan harapan akan mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara anggota PBB lainnya."

F. Jangkauan Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, penulis membuat batasan dalam penelitian ini, yaitu sejak tahun 2011 pada bulan september khususnya. Yaitu sejak Palestina berupaya mendapatkan kemerdekaan melalui PBB pada bulan September tahun 2011, dan tentang kendala-kendala yang di hadapi Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya sehingga sampai saat ini Palestina belum juga bisa memperoleh kemerdekaan, serta momentum dukungan dari berbagai Negara terhadap Palestina untuk bisa mendapatkan kemerdekaan. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk memasukkan data-data di luar itu untuk mendukung penelitian ini. Serta tidak menutup kemungkinan juga untuk penulis

¹³ <http://www.dakwatuna.com/2011/09/14843/palestina-dalam-perspektif-hukum-internasional/>.
Diakses pada 17 Oktober 2011

mencantumkan kejadian di tahun-tahun sebelumnya yang dianggap masih relevan untuk penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Analisa terhadap permasalahan ini dilakukan melalui studi pustaka dengan cara mengumpulkan, pemilihan dan mengkaji data-data, pendapat serta informasi yang didapat melalui buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar dan internet. Analisa terhadap permasalahan ini *style-nya* adalah kualitatif dan menggunakan metode deduktif.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Menjelaskan tentang pendahuluan yang memuat tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, tehnik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II Menjelaskan tentang sejarah Palestina dan ketidak pastian nasib Palestina dalam mendapatkan kemerdekaan..

BAB III Menjelaskan tentang upaya Palestina melalui diplomasi multilateral dan bilateral serta momentum dukungan terhadap Palestina dalam mendapatkan kemerdekaan.

BAB IV Kesimpulan, merupakan rangkuman pada bab-bab sebelumnya, juga berisi penegasan alasan-alasan yang digunakan.